



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia – Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

LAKIP ini disusun sebagai perwujudan bagi terselenggaranya *Good Governance*, sebagai syarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk maksud tersebut diatas maka diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Dengan laporan ini dibuat dan diharapkan umpan balik dan masukan serta saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan.

Benteng, Maret 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,  
DAN POLITIK,**

**Hj. ANDI DAENG, S.Sos., M.H.**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**NIP : 19681216 199003 2 007**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berakhirnya tahun anggaran 2022 menandai Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyelesaikan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis tahun 2021-2026 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2022.

Implementasi Rencana Strategis tahun 2021-2026 dan Renja 2022 telah memberikan arah yang jelas dalam upaya peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 dalam melaksanakan visinya dalam **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia“**.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 adalah **95,94 %**, dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan 6 (enam) program dan 11 (Sebelas ) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan yang dibiayai oleh APBD tahun 2022 sebesar Rp 4.020.787.800,-

Dengan demikian core area Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 yaitu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan kondisi ketahanan bangsa yang kokoh serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan yang kondusif di daerah dapat diwujudkan.

Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal, yang dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Benteng, Maret 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,  
DAN POLITIK,**

**Hj. ANDI DAENG, S.Sos., M.H.**

**Pangkat : Pembina TK. I**

**NIP : 19681216 199003 2 007**

## DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR	ii	
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii	
DAFTAR ISI	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
	C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	4
	1. SUMBER DAYA APARATUR	4
	2. SARANA DAN PRASARANA	9
	3. KEUANGAN	10
	D. ISU – ISU STRATEGIS	11
BAB II	PERENCANAAN STRATEGI DAN PERJANJIAN KINERJA	15
	A. RENCANA STRATEGI	15
	1. TUJUAN	16
	2. SASARAN	17
	3. STRATEGI	20
	B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	20
	C. RENCANA KINERJA TAHUN 2021	24
	D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	26
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	30
	A. PENGUKURAN KINERJA	30
	B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	37
	C. REALISASI KEUANGAN	78
BAB IV	PENUTUP	95
LAMPIRAN		
Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2023		
Lampiran II RKT (Rencana Kinerja Tahunan)		
Lampiran III PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)		
Lampiran IV PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)		

**A. LATAR BELAKANG**

---

---

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita - cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan Legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme. Fungsi pemerintahan tersebut akan dapat terselenggaradengan baik apabila terwujudnyaGood Governance.

Salah satu pilar good governance adalah akuntabilitas sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaranstrategisyang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang telah di rencanakan secara periodik.Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan reuiu dan evaluasi mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut.

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2021-2026 dituangkan dalam Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif yang lain Laporan Kinerja merupakan alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam rangka menuju perwujudan Good Governance, atau sebagai media pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan Kinerja disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna

mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2022 berdasarkan pada indikator (inputs, Outputs, dan Outcomes), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya.

Oleh karena itu laporan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Badan Kesbang, dan Politik ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2022.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

---

---

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance.

2. Sebagai alat ukur pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.
3. Sebagai informasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.
4. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap informasi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Lakip adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi terkait kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dicapai atau yang seharusnya tercapai.
2. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar.

## C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

### 1. Sumber Daya Aparatur

#### a. Keadaan Pegawai.

Keadaan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar menurut kepangkatan tahun 2022 sebagai berikut :

• Pembina/Golongan IV	=	3 orang
• Penata/Golongan III	=	13 orang
• Pengatur/Golongan II	=	- orang
• <u>Juru/Golongan I</u>	=	<u>-orang</u>
<b>Jumlah</b>	=	<b>16 orang</b>

Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan :

• Sarjana (S2)	=	3 orang
• Sarjana (S1)	=	11 orang
• Sarjana Muda ( D3 )	=	1 orang
• SLTA	=	1 orang
• <u>SLTP</u>	=	<u>- orang</u>
<b>J u m l a h</b>	=	<b>16 orang</b>

Adapun nama – nama pejabat dan pegawai Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik adalah sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Hj. Andi Daeng, S.Sos., M.H. 19681216 199003 2 007	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Badan	
2.	Dewi Marwiyah, S.E.,M.H. 197007 200703 2 028	Pembina, IV/a	Sekretaris	
3.	Ir. Stefanus Lao 19660529 199503 1 003	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
4.	Hj. Apriana Susilawati, S.E.M.,M.M. 19830403 201101 2 013	PenataTK. I, III/d	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
5.	Muhammad Sukri, S.E. 19640810 200604 1 011	Penata TK. I, III/d	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosbud, dan Agama	
6.	Suarif Saputra, S.E. 19880727 200503 1 006	Penata Muda TK. I, III/b	Kasubid. Organisasi Kemasyarakatan	
7.	Rusman, S. STP. 19910731 201206 1 003	Penata, III/c	Kasubid. Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Agama	
8.	Agustiar, S.E. 19661117 200604 1 009	PenataTK. I, III/d	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	
9.	Hj. Hasrawati, S.E. 19700412 199803 2 009	Penata TK. I, III/d	Kasubid. Politik Dalam Negeri	
10.	Nurdiah.DS, S.E 19770617 200901 2 004	Penata TK. I, III/d	Kasubag. Program dan Keuangan	
11.	Haerati Nadirah, S.Pd. 19740403 199303 2 006	Penata TK. I, III/d	Kasubid. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
12.	ST. Ratnawati, S.P. 19781219 200604 2 010	Penata TK. I, III/d	Kasubid. Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	
13.	Hj. ST. Ramlah, AMK. 19660114 198802 2 005	Penata TK. I, III/d	Kasubid. Penanganan Konflik	
14.	Ira, S.A.P. 19850225 200801 2 010	Penata Muda, III/a	Staf	
15.	Andi Rudi Kurniawan 19790717 200801 1 024	Pengatur, II/c	Staf	
16.	Roslina Dewi 19810624 200701 2 013	Pengatur, II/c	Staf	

Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan :

- Diklat SPAMEN/Diklat PIM Tk. II = - orang
- Diklat SPAMA/Diklat PIM Tk. III = 2 orang
- Diklat ADUM/ADUMLA = 11 orang
- Diklat Manajemen Proyek = .....orang
- Diklat Bendaharawan = 1 orang
- Diklat Lainnya = ..... orang
- J u m l a h = 14 orang**

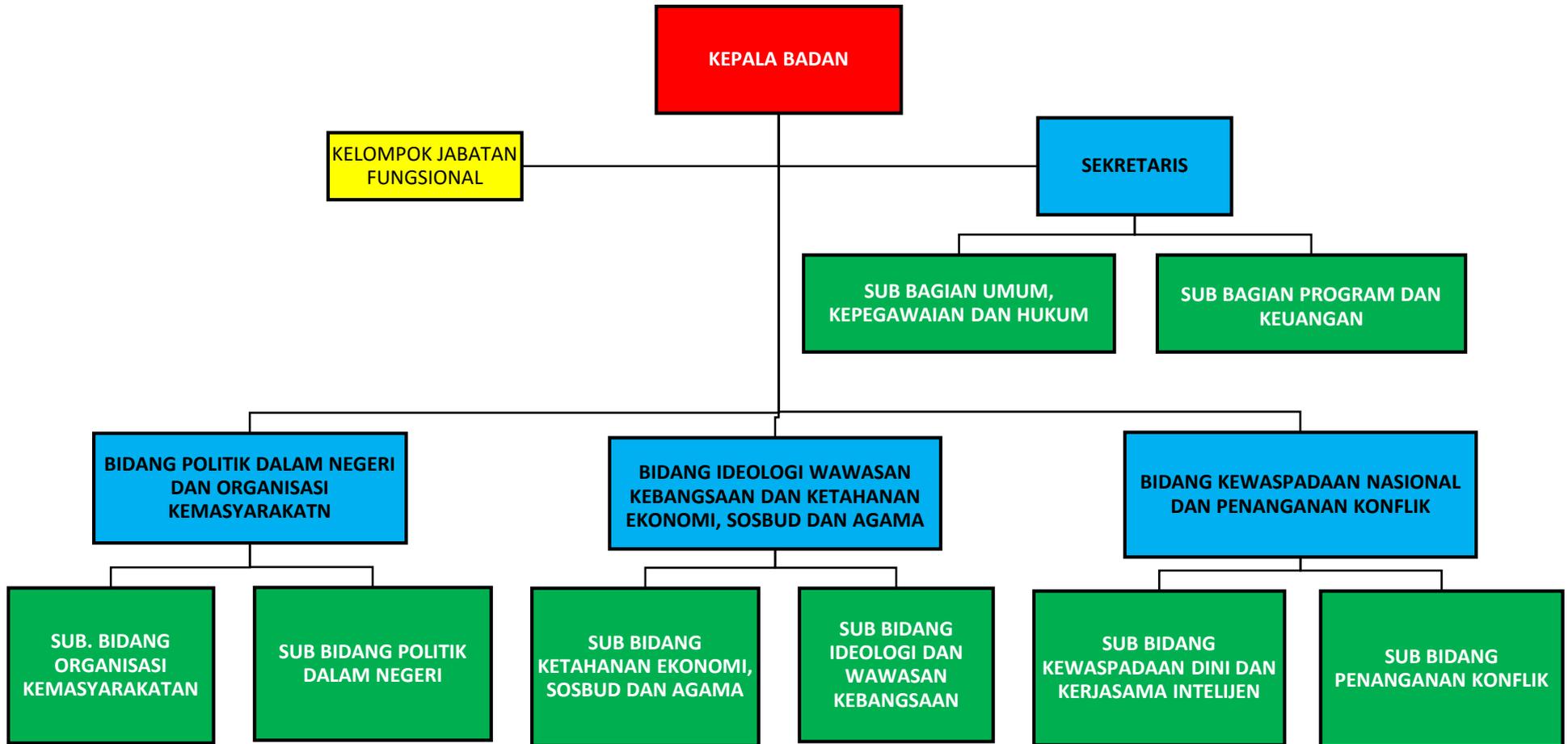
Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional:

- Eselon II = 1 orang
- Eselon III = 4 orang
- Eselon IV = 2 orang
- Fungsional = 6 orang
- J u m l a h = 13 orang**

#### **b. Struktur Organisasi**

Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti terlihat dalam gambar berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
(Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2020)**



Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kepulauan Selayar dapat kami sampaikan sebagai berikut :

### **1) Kedudukan**

Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

### **2) Tugas Pokok**

Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

### **3) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, dan politik;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pelaksanaan administrasi di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugasnya.

Sehubungan dengan Tupoksi ini berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang akan dan mungkin akan dihadapi. Hal-hal tersebut antara lain : Gangguan Kantibmas dalam pelaksanaan / proses pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar,

termasuk gangguan pembangunan perpolitikan, pengendalian kantibmas serta gangguan lain yang berhubungan dengan konflik Ras.

Untuk melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada, Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama terdiri dari :
  1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  2. Sub Bidang Sosial, Budaya, dan Agama.
- d. Bidang Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Politik dalam negeri;
  2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
  1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
  2. Sub Bidang Penanganan Konflik
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Sarana Prasarana**

Potensi sumberdaya peralatan (sarana dan prasarana) yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

Tabel 1.1  
 Jumlah Sarana Dan Prasarana  
 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Tahun 2022

<b>No.</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>
1.	Kendaraan Dinas roda empat	1 unit	
2.	Kendaraan dinas roda dua	15 unit	
3.	LCD & Layar LCD	2 unit	1 layar rusak
4.	Lap Top	5 unit	
5.	Handy Camera	1 unit	
6.	Camera digital	1 unit	
7.	Komputer PC	8 unit	1 rusak
8.	Lemari Arsip	8 unit	
9.	Mesin ketik	2 unit	
10.	Printer	6 unit	1 rusak
11.	Meja kerja	21 unit	
12.	Meja rapat	2 unit	

### **3. Keuangan**

Pada tahun 2020 Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan dukungan ketersediaan sumber daya finansial yang terserap sebesar Rp. 2.104.188.162,- sedangkan untuk tahun 2021 dana yang diserap sebesar Rp. 3.981.443.804,- atau naik sebesar 47%. Dan Pada Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat dukungan dana sebesar Rp. 4.020.787.800,- atau naik sebesar 0,99% yang pemanfaatannya untuk melaksanakan 6 program 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan .

Adapun Realisasi anggaran belanja operasi dan belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2.**  
**URAIAN PEMBIAYAAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>Rp. 4.020.787.800</b>	
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp 3.932.457.800</b>	
	- Belanja Pegawai	Rp 1.430.957.008	
	- Belanja Barang	Rp. 1.008.938.988	
	- Belanja Hibah	Rp. 1.492.561.804	
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp. 88.330.000</b>	
	- Belanja Modal	Rp. 88.330.000	
	<b>Jumlah APBD Kabupaten</b>	<b>Rp. 4.020.787.800</b>	

Tabel di atas menunjukkan bahwa struktur keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun anggaran 2022. Apabila dilihat dari strukturnya jelas terlihat bahwa untuk anggaran belanja pegawai cukup besar yakni sebesar 35,59 % sedangkan untuk belanja barang yaitu sebesar 25,09% dan untuk Belanja Modal hanya sebesar 2,20 %.

#### **D. ISU – ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dapat diuraikan berbagai permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik Eksternal maupun internal sebagai berikut:

1. Peningkatan Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional dan daerah.
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial, isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang

memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagaimana untuk memecah belah keutuhan bangsa.

3. Terorisme dan radikalisme, banyaknya warga NEGARA Indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok terorisisme seperti ISIS.
4. Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak dari kemajuan teknologi dan informasi.
5. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Indonesia dan khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar sekarang bukan lagi merupakan negara / daerah transit narkoba tetapi merupakan negara/daerah pemakai.
6. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, aparat dan masyarakat semakin luntur dengan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan sosial.
7. Kualitas demokrasi, nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum.
8. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis serba instan dan mengabaikan proses yang berkualitas.
9. Kaderisasi Partai Politik yang belum berjalan dengan baik serta kecenderungan Partai Politik yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok elite - elitnya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat.
10. Masih adanya pandangan di kalangan pengambil kebijakan bahwa bidang kesatuan bangsa dan politik tidak begitu penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
11. Kurangnya kesadaran ormas dan LSM untuk mendaftar / memberitahukan keberadaannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12. Belum adanya aplikasi data base LSM, ormas dan parpol;

13. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara unit kerja (SKPD) yang ada di daerah yang melakukan kerjasama dengan Pihak ketiga (Ormas/LSM) untuk melampirkan surat keterangan terdaftar Ormas/LSM yang dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
14. Belum ada koordinasi yang konkrit antara aparat keamanan lain guna menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan daerah.
15. Rendahnya Tingkatan Pemantauan / Pelaporan yang berhubungan keamanan, ketertiban umum masyarakat di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan
16. Keterbatasan SDM aparatur Pemerintah.
17. Adanya pengaruh budaya barat terhadap seni dan budaya daerah.
18. Belum terpeliharanya kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama dengan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
19. Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik di daerah, masih banyak potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya konflik yang berlatar belakang sengketa lahan, pertambangan/perkebunan/perhutanan, perbatasan antar daerah, SARA, dan Pilkada. Sebagai institusi yang bertugas mendukung terciptanya stabilitas keamanan daerah, Badan Kesbangpol perlu meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan daerah rawan konflik agar potensi konflik yang muncul di daerah tidak berkembang menjadi konflik yang anarkis yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, perlu koordinasi yang intensif dengan jajaran Forkopimda, tim FKDM, dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah untuk mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
20. Semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan yang membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme, sehingga diperlukan pendidikan wawasan kebangsaan, penguatan karakter bangsa bagi masyarakat khususnya generasi muda.

21. Munculnya persoalan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah pasca direvisinya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan ditundanya pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum hingga batas waktu yang tidak ditentukan yang pada akhirnya bermuara pada tidak optimalnya pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa dan politik di daerah. Persoalan tersebut diantaranya :

- a. Tidak terakomodirnya pelaksanaan program prioritas di daerah yang berkaitan dengan substansi urusan pemerintahan umum
- b. Terjadinya penurunan anggaran Kesbangpol yang signifikan, sehingga menurunkan kinerja.
- c. Masih tingginya angka kriminalitas di Sumbar khususnya di daerah perkotaan. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya serius untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat khususnya generasi muda melalui kegiatan sosialisasi dan pembekalan agar angka kriminalitas di Sumbar dapat berkurang.

**A. Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol**

---

---

Perencanaan Strategis disusun sebagai upaya mewujudkan good governance dan clean government yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pasal 6 ayat 2 disebutkan SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun.

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2021 – 2026 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Bupati.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**.

Dalam rumusan visi ini terdapat 2 (tiga) pokok visi yakni **“kabupaten maritim”** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang serta perdagangan barang, jasa dan industri merupakan perwujudan visi yang hendak dicapai, “dan **kawasan timur Indonesia**” adalah menunjukkan bahwa Selayar berada pada kawasan timur Indonesia dengan jaringan (hubungan) perdagangan barang/jasa, industri dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah bagian timur, Maluku dan Maluku Utara.

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) Misi Tahun 2021 – 2026 yaitu :

1. Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan Transparan
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
4. Mengembangkan Pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Misi Bupati tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan misi 1 yaitu **“mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan Transparan”** dan misi 5 yaitu **“Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan”**.

## **1. Tujuan**

---

Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang memberikan gambaran tentang sesuatu yang akan dicapai atau yang ingin dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan perumusan tujuan strategis ini, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar dapat secara tepat mengetahui apa yang akan dilaksanakan dalam memenuhi visi dan

misinya dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan memperhatikan sumber daya yang dimilikinya.

Adapun tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan stabilitas daerah dalam kehidupan masyarakat.

## **2. Sasaran**

---

Setelah merumuskan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Penetapan sasaran ini diikuti dengan penetapan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Program tersebut sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran.

Dalam Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 yang disesuaikan dengan kondisi perubahan kelembagaan, telah menetapkan 6 (enam) sasaran dan 6 (enam) program dan didukung oleh 11 (Sebelas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan.

Untuk mewujudkan sasaran dan program Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Nilai SAKIP

No	Kebijakan	No	Program
1.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.	Penunjang Urusan Pemerintahan

Sasaran2 : Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah

No.	Kebijakan	No.	Program
1.	Peningkatan tata tertib administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1.	Penunjang Urusan Pemerintahan

Sasaran 3 : Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat

No.	Kebijakan	No.	Program
1.	Peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat yang menopang kokohnya integrasi nasional dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia	1.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sasaran4 : Meningkatnya pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan

No.	Kebijakan	No.	Program
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang politik	1.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		2.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sasaran 5 : Terinternalisasikannya ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama

No.	Kebijakan	No.	Program
1.	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	1.	Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sasaran 6 : Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik

No.	Kebijakan	No.	Program
1.	Peningkatan peran Forum Kewaspadaan dini daerah, FPK, FKUB dan Forum Kewaspadaan dini Masyarakat serta Tim terpadu penanganan konflik sosial melalui Pusat Komunikasi informasi (Puskominfo)	1.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

### **3. Strategi**

---

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, maka Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, menetapkan strategi yang di arahkan pada :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan masyarakat dalam menyikapi perbedaan
4. Meningkatkan pemahaman politik masyarakat
5. Memantapkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama sebagai kekuatan bangsa
6. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pluralitas bangsa (multikulturisme)

### **B. Indikator Kinerja Utama**

---

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan darisuatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atauInstansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utamasebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu padasasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan KerjaPerangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaranstrategis.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristikdan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukurankinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yaitu:

1. *Spesifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akandiukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable;*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baikyang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable*;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkandatanya oleh organisasi.

4. *Relevant*;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines*;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

Adapun indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	Menunjukkan hasil Evaluasi SAKIP OPD	Sekretariat	Laporan Kegiatan Badan Kesbangpol	
2.	Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD	Menunjukkan kesesuaian antara laporan keuangan OPD dengan standar akuntansi pemerintahan	Sekretariat	sda	
3.	Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat	Cakupan pelibatan masyarakat dalam penyebaran wawasan kebangsaan dan karakter	$\frac{\text{Prosentase Jumlah Masyarakat dalam penyebaran Wawasan Kebangsaan dan karakter}}{\text{Jumlah masyarakat yang terlibat pada 10.000 penduduk}} \times 100\%$	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Laporan Kegiatan Badan Kesbangpol	

4.	Meningkatnya pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan	Prosentase partai Politik yang mengikuti Pendidikan Politik	$\frac{\text{Jumlah Partai Politik yang Mengikuti pendidikan politik}}{\text{Jumlah keseluruhan partai politik yang terdaftar}} \times 100\%$	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Kegiatan Badan Kesbangpol	
		Prosentase ORMAS yang dibina	$\frac{\text{Jumlah ORMAS yang dibina}}{\text{Jumlah ORMAS Terdaftar}} \times 100\%$	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Kegiatan Badan Kesbangpol	
5.	Terinternalisasikannya ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	tingkat Pemahaman dan penerapan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	Menunjukkan tingkat Pemahaman dan penerapan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	sda	
6.	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	Prosentase Wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme/radikal ismedan konflik sosial	$\frac{\text{Jumlah Wilayah yang dibina}}{\text{Jumlah keseluruhan wilayah Yang ada}} \times 100\%$	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Laporan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	

### **C. Rencana Kerja Tahunan 2022**

---

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 disajikan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LAKIP tahun 2022 ini.

Berangkat dari hal tersebut, maka pada tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kab. Kepulauan Selayar menetapkan rencana kinerja tahunan ( RKT ) sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	CC
2.	Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD	sesuai
3.	Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter	0,026%
4.	Meningkatnya pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan	Prosentase Partai Politik yang mengikuti Pendidikan Politik	100%
		Prosentase ORMAS yang dibina	36,36%
5.	Terinternalisasikannya ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	70%
6.	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	Prosentase Wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme/radikalismedan konflik sosial	54,54%

#### **D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

---

Dengan telah diterbitkannya Inpres RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar menindaklanjuti dengan menyusun dan menetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah: untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Penetapan Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah disesuaikan setelah Penetapan APBD Tahun 2022.

Adapun ringkasan penetapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**PENETAPAN KINERJA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN ( Rp )</b>
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	CC	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	2.500.000
2.	Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD	sesuai	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.347.000
3.	Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter	0,026	Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakterbangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	26.651.200
				Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakterbangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	43.251.000
4.	Meningkatnya pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan	Prosentase Partai Politik yang mengikuti Pendidikan Politik	100%	pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	672.535.200
		Prosentase ORMAS yang dibina	36,36 %	Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	673.719.300

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN ( Rp )
5.	Terinternalisasikannya ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	70%	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	161.042.000
				Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	42.869.100
6.	Peningkatan Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sistem politik yang demokratis, partisipatif, dinamis dan transparan	Prosentase Wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme/ra dikalimedian konflik sosial	54,54 %	Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	202.863.000
				Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	33.389.200
				Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	19.435.000

Jumlah Anggaran

Program Utama / Program Penunjang : Rp. 4.020.787.800

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. ANDI DAENG, S.Sos., M.H..  
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MUH. BASLI ALI  
Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 11 Januari 2022

**Pihak Kedua,  
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**Pihak Pertama,  
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,  
DAN POLITIK**

**H. MUH. BASLI ALI**

**Hj. ANDI DAENG, S.Sos., M.H.**  
Pangkat : Pembina TK. I  
NIP. 19681216 199003 2 007

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. PENGUKURAN KINERJA**

---

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 ditetapkan dengan indikator kinerja yaitu input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak), namun demikian pada tahun yang bersangkutan belum seluruhnya dapat diukur khususnya indikator benefit (manfaat) dan impact (dampak). Pengukuran kedua indikator tersebut tidak dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, tetapi akan sangat erat kaitannya dengan kegiatan lainnya, dan dalam implementasinya masih membutuhkan pembangunan infrastruktur atas sistem pengumpulan data yang didukung oleh sub sistem-sub sistem.

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selamaperiode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Pada laporan kinerja ini, pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode

pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesbangpol serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact.

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core Area Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju Sejahtera dan Religius.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 85 – 100 = Sangat Baik
- 69 – 84 = Baik
- 53 - 68 = Cukup
- < 52 = Kurang / Gagal

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yang dapat digunakan yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis. Dari 6 (enam) sasaran strategis tersebut, ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja sebanyak 6 (enam) indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebesar **95,94%** sebagaimana disajikan pada tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	CC (60)	B (68,35)	113,92%
<b>Rata-rata Persentase Capaian Kinerja</b> Meningkatkan Nilai SAKIP					<b>113,92%</b>
2	Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD	sesuai	sesuai	100%
<b>Rata-rata Persentase</b> Meningkatkan tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah					<b>100%</b>
3	Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter	0,026	0,016	61,54%
<b>Rata-rata Persentase</b> Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat					<b>61,54%</b>
4	Meningkatnya pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan	Prosentase Partai Politik yang mengikuti pendidikan politik	100%	100%	100%
		Prosentase ORMAS yang dibina	36,36%	36,50%	100,39%
<b>Rata-rata Persentase</b> Meningkatkan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan					<b>100,19%</b>
5	Terinternalisasikan nya ketahanan ideology, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	70%	70%	100%
<b>Rata-rata Persentase</b> Terinternalisasikannya ketahanan ideology, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama					<b>100%</b>
6	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	54,54%	54,54%	100%
<b>Rata-rata Persentase</b> Meningkatkan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik					<b>100%</b>
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</b>					<b>95,94%</b>

Pada tabel di atas, hasil pengukuran kinerja untuk capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dari 6 (enam) sasaran strategis hanya 1(satu) sasaran strategis tidak berhasil dicapai dan 5 (lima) sasaran strategis sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kategori nilai “**Sangat Baik**” dengan nilai 95,94% untuk sasaran 1, 113,92% untuk sasaran 2, 100% untuk sasaran 3, 61,54%, untuk sasaran 4, 100,39% dan untuk sasaran 5, 100 % serta sasaran 6, 100%. Jika dibandingkan keenam sasaran tersebut, capaian indikator kinerja terendah, yaitu indikator kinerja nilai Cakupan pelaksanaan pembinaan karakter untuk mengukur sasaran strategis Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat.

Terhadap target capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar harus melakukan langkah-langkah konkrit untuk menganalisis dan mengevaluasi progress capaian kinerja yang dicapai agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang. Salah satu indikator kinerja yang belum mencapai target adalah indikator kinerja meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat. Setiap aspek atau komponen yang menjadi penilaian dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja perlu ditingkatkan capaiannya dan dilakukan evaluasi secara terus menerus. Jika dibandingkan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2021 merupakan tahun pertama RPJMD tahun 2021-2022 dapat digambarkan sebagaimana disajikan pada tabel 3.4 berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis**  
**Tahun 2021 s/d 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	CC (56,63)	CC (60)	B (63,54)	B (68,35)	113,26 %	113,92 %
2	Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	100%	100%
3	Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter	0,026	0,026	0,018	0,016	69,23 %	61,54 %
4	Meningkatnya pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan	Prosentase Partai Politik yang mengikuti pendidikan politik	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase ORMAS yang dibina	36,36 %	36,36 %	36,36 %	36,50 %	100%	100,39 %
5	Terinternalisaskannya ketahanan ideology, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai ideology dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	70%	70%	70%	70%	100%	100%
6	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	54,54 %	54,54 %	54,54 %	54,54 %	100%	100%
<b>Rata-rata kinerja</b>							95,83 %	95,94 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 95,83% dan tahun 2022 sebesar 95,94%, namun untuk realisasi kinerja indikator cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor terutama faktor dari luar yang bukan merupakan kewenangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga realisasi kinerja yang dicapai tidak seluruhnya tercapai sesuai target.

Tidak tercapainya indikator Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter disebabkan karena :

1. Adanya pengurangan (refocusing) anggaran akibat pandemic COvid-19 yang masih belum terkendali sehingga tidak optimalnya sosialisasi dan pembinaan karakter bagi masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda serta berbagai etnis yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemberdayaan local wisdom belum terjangkau di setiap kecamatan yang ada seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama serta komponen masyarakat lainnya dalam penyebarluasan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta karakter kebangsaan.
3. Belum adanya program untuk kerjasama dengan BUMN/BUMD dan instansi yang ada didaerah dalam rangka pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan.

## **B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

### **1. ANALISIS KINERJA SASARAN I**

Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, dan terukur merupakan media untuk mengetahui kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, disajikan dalam bentuk perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebagai berikut :

<b>SASARAN I</b>
<b>MENINGKATNYA NILAI SAKIP</b>

#### **CAPAIAN KINERJA SASARAN :**

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 1**  
**Nilai SAKIP OPD**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Nilai SAKIP OPD	Nilai	CC (60)	B (68,35)	113,92%

Dari tabel 3.3 dapat dilihat target indikator kinerja nilai SAKIP OPD pada tahun 2022 adalah CC (60), sedangkan realisasinya adalah B (68,35) maka tingkat capaiannya 105,90%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja “**sangat baik.**”

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{68,35}{60,00} \times 100\% = 113,92\%$$

**Tabel 3.4.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran I**  
**Nilai SAKIP OPD**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Nilai SAKIP OPD	CC (56,63)	CC (60)	B (63,54)	B (68,35)	112,20 %	113,92 %

**Sasaran I dicapai dengan program sebagai berikut :**

- I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu program yang mendukung urusan pemerintahan daerah dalam rangka mencapai tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan politik. Tercapainya indikator diatas dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.395.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.395.000 dan secara fisik pula tercapai 100%. Aktifitas dari kegiatan ini adalah menyusuna rencana kerja Badan Kesbangpol untuk tahun anggaran 2022 maupun perubahannya,

- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.700.000 dan secara fisik pula tercapai 100%.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.820.000 dan secara fisik pula tercapai 100%.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 2.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.820.000 dan secara fisik pula tercapai 100%.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan DPA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.820.000 dan secara fisik pula tercapai 100%.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2,260.000 atau 90,40%.
- g. Evaluasi Kinerja perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.710.000 dan secara fisik pula tercapai 100%.

Salah satu upaya dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien adalah melalui penerapan SAKIP. Karena itu dibutuhkan komitmen dari pimpinan OPD untuk memperbaiki pertanggungjawaban anggarannya yang diserap dan dikeluarkan.

Komitmen kuat dari pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menciptakan *good governance dan clean government* di lingkungan kerja merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan lebih lanjut tentang laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*discosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayart berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 mendapat nilai 68,35 dengan kategori B (interpretasi BAIK), dengan pengertian baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kerja yang andal, dan perlu sedikit perbaikan. Prediket evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut berdasarkan laporan hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 046/REV-LAKIP/III/2023/ITDA tanggal 07 Maret 2023.

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 25%), Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), Evaluasi Internal (Bobot 10%), dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (Bobot 20%).

Adapun hasil penilaian SAKIP yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5.**  
**Hasil Evaluasi SAKIP OPD**  
**Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Komponen yang dinilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Hasil evaluasi</b>
1	Perencanaan Kinerja	30	22,25
2	Pengukuran Kinerja	25	15,00
3	Pelaporan Kinerja	15	9,70
4	Evaluasi Internal	10	6,44
5	Pencapaian Kinerja	20	14,96
	<b>JUMLAH</b>	<b>100</b>	<b>68,35</b>

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menargetkan nilai SAKIP yaitu CC (60%) dan tentunya dari hasil evaluasi tersebut Badan Kesbangpol telah melebihi capaian target tersebut dengan nilai B (68,35%) artinya bahwa terdapat gambaran yang baik dalam melaksanakan semua program dan kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.020.787.800,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 3.859.240.994,- atau 95,98%.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol yaitu dengan mengimplementasikan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu melalui kolaborasi dan sinergi dari tiap bidang maupun di tiap unit kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar dari

tahun-tahun sebelumnya. Adapun faktor penyebab keberhasilan terhadap peningkatan nilai SAKIP Badan Kesbangpol tahun 2022 dari tahun-tahun sebelumnya antara lain :

- a. Penyajian dokumen Renstra lebih lengkap dan sesuai dengan regulasi yang ada. Renstra yang disusun sudah memuat tujuan dan sasaran strategis dan telah ditetapkan target untuk masing-masing indikator tujuan dan sasaran. Dokumen Renstra juga telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran dan telah dimonitoring pencapaiannya secara berkala.
- b. Dokumen yang menjadi penilaian dalam evaluasi SAKIP diantaranya Renstra, Perencanaan Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan IKU.
- c. Sudah ada rencana aksi atas kinerja yang diperjanjikan dan telah mencantumkan target secara periodik/triwulan, dan dimonitor pencapaiannya secara berkala setiap triwulan.
- d. Telah disusunnya evaluasi kinerja internal yang digunakan untuk melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Meskipun nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, untuk meningkatkan capaian kinerja untuk indikator ini perlu terus diupayakan.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja diantaranya :

- 1) Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
- 2) Mengintensifkan rapat internal di lingkungan SKPD untuk mengevaluasi capaian kinerja masing-masing aparatur serta mengantisipasi kendala atau gangguan yang dapat menghambat pencapaian kinerja masing-masing aparatur.
- 3) Mengevaluasi keselarasan semua dokumen perencanaan sampai ke tingkat bawah.
- 4) Melengkapi segala bentuk dokumen yang dibutuhkan dalam evaluasi SAKIP diantaranya rencana aksi beserta pencapaiannya setiap triwulan, perjanjian kinerja beserta target indikatornya sampai jenjang staf, dan dokumen lainnya.
- 5) Mengupayakan adanya reward dan punishment bagi aparatur dalam pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang pada Perjanjian Kinerja masing-masing pegawai
- 6) Melakukan update dan revisi terhadap dokumen-dokumen yang perlu dilakukan penyesuaian.

## 2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN II

<b>SASARAN II</b> <b>MENINGKATNYA TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGELOLAAN</b> <b>KEUANGAN DAN ASSET DAERAH</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### CAPAIAN KINERJA SASARAN :

**Tabel 3.6**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 2**  
**Laporan Keuangan OPD**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	sesuai	Sesuai	100%

Dari tabel 3.5 dapat dilihat target indikator kinerja Laporan Keuangan OPD pada tahun 2022 adalah sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan sedangkan realisasinya adalah sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan, maka tingkat capaiannya 100%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja “**sangat baik.**”

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

**Tabel 3.7.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran II**  
**Laporan Keuangan OPD**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Laporan Keuangan OPD	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	100%	100%

**Sasaran 2 dicapai dengan program sebagai berikut :**

- I.** Program penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu program yang mendukung urusan pemerintahan daerah dalam rangka mencapai tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan politik. Tercapainya indikator diatas dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.347.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.797.000 dan secara fisik pula tercapai 89,71%.

Jenis laporan keuangan yang dihasilkan ditentukan oleh jenis entitas pelaporan serta periode pelaporan. Untuk laporan periode bulanan, triwulanan, dan semesteran, SKPD wajib menyerahkan laporan keuangan berupa :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan
- b. Laporan Operasional (LO)

**1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA),**

Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Kesbangpol yang menggambarkan

perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran Badan Kesbangpol secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundangundangan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari belanja, dan pembiayaan.

## 2) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan dan Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut hasil Rekonsiliasi keuangan dan aset yang dikordinir oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa hasil laporan keuangan dan aset Bakesbangpol sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

### **3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN III**

<b>SASARAN 3</b> <b>MENINGKATNYA PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER MASYARAKAT</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------

**CAPAIAN KINERJA SASARAN :**

**Tabel 3.8**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 3**  
**Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan**  
**dan karakter masyarakat**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter	0,026	0,016	61,54%

Dari tabel 3.6. di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,026, sedangkan realisasinya sebesar 0,016 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 61,54%. Dengan kata lain bahwa Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar dikategorikan Baik artinya Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3**  
**Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan**  
**dan karakter masyarakat**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter	0,026	0,026	0,018	0,016	69,23%	61,54%

Untuk pencapaian kinerja ini dicapai dengan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.902.200 dan yang terealisasi sebesar Rp. 59.920.800 atau 85,72%, dengan pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 69.902.200 dan terealisasi sebesar Rp. 59.520.800 atau 85,72% yang dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu **Sub kegiatan Pertama** adalah Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.651.200 yang terealisasi sebesar Rp. 23.241.200 atau 87,21% dimana aktifitas kegiatannya adalah pelaksanaan sosialisasi empat pilar kebangsaan dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang.

Selanjutnya **Sub Kegiatan kedua** adalah Pelaksanaan Koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.251.000 yang terealisasi sebesar Rp. 36.679.600 atau 84,81% dimana **aktifitas kegiatan yang pertama** adalah pelaksanaan **Forum Pembauran kebangsaan** yang terdiri dari 11 kerukunan masyarakat dimana nantinya melalui forum ini diharapkan dapat terlibat dalam penyebaran wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.185.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.832.200. Adapun forum pembauran kebangsaan yang terdaftar di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. Forum Kerukunan Keluarga Bone
2. Forum Kerukunan Keluarga Bulukumba
3. Forum Kerukunan Keluarga Toraja
4. Forum Kerukunan Keluarga Wajo
5. Forum Kerukunan Keluarga Jawa
6. Forum Kerukunan Keluarga Bima
7. Forum Kerukunan Keluarga Jeneponto
8. Forum Kerukunan Keluarga Pinrang
9. Forum Kerukunan Keluarga Takalar
10. Forum Kerukunan Keluarga Mandar
11. Forum Kerukunan Keluarga Tionghoa

**Aktifitas yang kedua** adalah Pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan yang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 29.066.0000 dan terealisasi sebesar Rp. 22.847.400 atau 78,61% dimana aktifitas yang dilaksanakan adalah sosialisasi pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda dengan peserta sebanyak 60 orang.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan juga bagi masyarakat dan generasi muda khususnya pelajar sebagai proses dalam pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya dalam memelihara kesinambungan perjalanan kehidupan bangsa, serta terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya peningkatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda khususnya pelajar dilakukan dengan membangun karakter agar memiliki wawasan dan motivasi yang kuat serta memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masa depan bangsa dan negaranya.

Ketidakberhasilan dalam pencapaian indikator Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter disebabkan karena :

- a. Adanya pengurangan (refocusing) anggaran akibat pandemic COVID-19 yang masih belum terkendali sehingga tidak optimalnya sosialisasi dan pembinaan karakter bagi masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda serta berbagai etnis yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Pemberdayaan local wisdom belum terjangkau di setiap kecamatan yang ada seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama serta komponen masyarakat lainnya dalam penyebarluasan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta karakter kebangsaan.
- c. Belum adanya program untuk kerjasama dengan BUMN/BUMD dan instansi yang ada di daerah dalam rangka pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan.

• **Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembinaan karakter pada tahun 2022 adalah :**

1. Alokasi dana untuk menunjang kegiatan tersebut pada tahun 2022 sangat kecil bahkan dengan adanya pandemi covid 19 anggaran dikurangi.
2. Dengan adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan pelaksanaan penyuluhan /sosialisasi kurang optimal karena adanya larangan untuk tidak boleh mengumpulkan masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan.
3. Kurangnya kegiatan sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya Dan Agama di sekolah-sekolah (SLTA) dan ormas/LSM.

4. Belum ada program untuk kerjasama dengan forum-forum kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Belum adanya program untuk kerjasama dengan BUMN/BUMD dan instansi yang ada didaerah dalam rangka pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan.
6. Luasnya daerah untuk dijangkau pada setiap kecamatan.

• **Solusi dalam rangka pelaksanaan pembinaan karakter sebagai berikut:**

1. Ditingkatkannya alokasi dana untuk program pengembangan wawasan kebangsaan pada tahun mendatang.
2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan yang dilakukan Bidang Nilai – Nilai Kebangsaan di sekolah-sekolah (SLTA) terutama untuk daerah kepulauan.
3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan kepada ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Mengadakan kerjasama dengan forum-forum kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan program pengembangan wawasan kebangsaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, serta meningkatkan kerjasama BUMN/BUMD yang ada didaerah sehingga pada pengajuan proposal kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan bisa terealisasi dengan cepat.

#### 4. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN IV

<b>SASARAN 4</b> <b>MENINGKATNYA PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### CAPAIAN KINERJA SASARAN :

**Tabel 3.10.**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 4**  
**Meningkatnya pembinaan politik dalam negeri**  
**dan organisasi kemasyarakata**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Prosentase Partai Politik yang mengikuti Pendidikan Politik	100%	100%	100%
Prosentase ORMAS yang dibina	36,36	36,50	100,39%

Dari tabel 3.7. di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja Prosentase Partai Politik yang mengikuti Pendidikan Politik pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%, sedangkan realisasinya sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Dengan kata lain bahwa Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar dikategorikan sangat baik. Dan target indikator kinerja Prosentase ORMAS yang dibina pada tahun 2022 yaitu sebesar 36,36% dan teralisasi sebesar 36,50% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,39%. Dengan kata lain bahwa Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar dikategorikan sangat baik.

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

**Tabel 3.11.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4**  
**Meningkatnya pembinaan politik dalam negeri**  
**dan organisasi kemasyarakata**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Prosentase Partai Politik yang mengikuti Pendidikan Politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase ORMAS yang dibina	36,36	36,36	36,36	36,50	100%	100,39%

Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan masing-masing indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatkan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yaitu :

**1) Prosentase Partai Politik yang mengikuti Pendidikan Politik**

Pencapaian Indikator Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, yang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 672.535.104 dan terealisasi sebesar Rp. 669.403.029 atau 99,53%, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan

demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dilaksanakan lagi melalui sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah anggaran sebesar Rp. 672.535.104 dan terealisasi sebesar Rp. 669.403.029 atau 99,53%, dimana sub kegiatan tersebut dilaksanakan melalui 3 aktifitas yaitu :

**Pertama** Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.983.000 dan terealisasi sebesar Rp. 7.298.800 atau 91,43%. Aktifitas ini dilaksanakan dengan maksud melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan pemilihan Umum Presiden dan pemilihan Kepala Daerah serta perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik di daerah, yang mencakup:

- a. Melakukan monitoring terhadap perkembangan politik dan situasi politik lainnya.
- b. Menginventarisasi permasalahan yang menyangkut perkembangan situasi politik
- c. Melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan situasi politik.

Monitoring ini akan dilakukan diseluruh kecamatan Daratan yaitu Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki dan Kecamatan Bontomatene.

**Aktifitas Kedua yaitu** pelaksanaan kegiatan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik dengan anggaran sebesar Rp. 11.140.300 dan yang terealisasi sebesar Rp. 8.693.700 atau 78,04 %. Dari hasil verifikasi sebanyak 9 partai politik memenuhi syarat kelengkapan berkas untuk mendapatkan bantuan keuangan kepada partai politik hasil pemilu 2019.

Adapun nama partai politik yang berkasnya diverifikasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.12.**

**NAMA – NAMA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KAB. KEPULAUAN SELAYAR HASIL PEMILU 2019 - 2024**

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Ket.
1.	Partai Golongan Karya	10	
2.	Partai Gerindra	3	
3.	Partai Demokrat	3	
4.	Partai Amanat Nasional	3	
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	
6.	Partai Nasdem	1	
7.	Partai Hanura	1	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2	
9.	PDIP	1	
	<b>Jumlah</b>	25	

Selanjutnya Aktifitas yang **ketiga** adalah pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dimana penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat kami jelaskan bahwa jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 25 kursi dengan partai politik yang memperoleh kursi tersebut sebanyak 9 partai politik.

Adapun besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.13.**  
**BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**  
**YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD**  
**KAB. KEPULAUAN SELAYAR**  
**HASIL PEMILU 2019 - 2024**

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah yang diberikan (Rp)
1.	Partai Golongan Karya	10	214.725.073
2.	Partai Gerindra	3	96.441.087
3.	Partai Demokrat	3	57.953.769
4.	Partai Amanat Nasional	3	96.747.426
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	54.751.134
6.	Partai Nasdem	1	43.955.005
7.	Partai Hanura	1	17.906.907
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2	51.065.783
9.	PDIP	1	19.865.620
	<b>Jumlah</b>	25	<b>653.411.804</b>

Dari 9 partai politik yang diberikan bantuan keuangan semua telah memenuhi syarat administrasi dan telah mendapatkan bantuan keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 653.411.804 dan terealisasi sebesar Rp. 653.410.529 atau 100% .

- **Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik pada tahun 2022 adalah :**
  - a. Alokasi dana untuk menunjang kegiatan tersebut pada tahun 2022 sangat kecil bahkan dengan adanya pandemi covid 19 anggaran dikurangi.
  - b. Masih banyak Partai politik yang belum memahami cara melaporkan laporan keuangannya terkait bantuan keuangan yang diberikan.
- **Solusi dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik sebagai berikut:**
  - a Ditingkatkannya alokasi dana untuk program Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada tahun mendatang.
  - b Meningkatkan kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Kepada Partai Politik.

## **2) Prosentase ORMAS yang dibina**

Pembinaan ormas Secara umum bahwa pembinaan terhadap Ormas, LSM, dan OKP di Kabupaten Kepulauan Selayar semakin baik, sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan organisasi non pemerintah.

Selain itu maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya data dan informasi sebagai dasar monitoring dan evaluasi perkembangan tentang keberadaan Ormas, LSM, dan OKP di masyarakat.

Dari data yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Selayar jumlah Ormas/LSM yang terdaftar sebanyak 120 organisasi. Dari jumlah ormas / LSM yang terdaftar tersebut sekitar 54 % diantaranya aktif melakukan

kegiatan di masyarakat dan mendukung upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi serta fungsi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah tidak henti-hentinya melakukan pembinaan dan mendorong agar organisasi tetap selalu eksis dalam ikut serta berperan aktif mewujudkan pembangunan nasional. Salah satunya dengan pemberian Hibah dan Bansos yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Program yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta Ormas/LSM dalam kegiatan pembangunan adalah Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 673.719.300 dan terealisasi sebesar Rp. 657.202.900 atau 97,55%.

Program ini melaksanakan kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 673.719.300 dan terealisasi sebesar Rp. 657.202.900 atau 97,55% yang terdiri dari 3 aktifitas yaitu:

**Pertama** Pemberian Hibah bagi ormas/LSM. Dari 14 ormas dan LSM yang mengajukan bantuan hibah dan bansos untuk TA. 2022, hanya sekitar 4 ormas dan LSM (28,57%) yang memenuhi syarat untuk diberikan Rekomendasi, yang tidak memenuhi syarat 8 ormas dan LSM (71,42 %). Hibah yang diberikan kepada 4 Ormas tersebut. Jumlah anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp. 623.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 623.000.000 atau 100%.

Adapun ormas yang diberikan hibah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.14.**

**Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Bantuan Hibah Tahun 2022**

No.	Nama Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Bantuan (Hibah)	Ket.
1.	Respek Unity	Rp. 50.000.000	
2.	Forum Komunitas Kelong	Rp. 53.000.000	
3.	PERHIPTANI	Rp. 20.000.000	
4.	PERMAS	Rp. 500.000.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 623.000.000</b>	

Selanjutnya aktifitas **kedua** adalah kegiatan pembinaan Ormas melalui sosialisasi bagi Ormas/LSM dengan jumlah peserta sebanyak 40 Ormas dan terealisasi sebanyak 40 ormas, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022 bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jumlah Anggaran yang dialokasikan

untuk kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 40.990.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 28.826.500 atau 70,33%.

Dan aktifitas **ketiga** adalah pendataan dan pendaftaran ORMAS. Untuk pendataan ORMAS untuk tahun 2022, jumlah ORMAS yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 160 ORMAS dan yang aktif hanya sekitar 54%, sedangkan untuk pendaftaran ORMAS untuk tahun 2022 belum ada ORMAS yang melaporkan keberadaannya di Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah anggaran yang diberikan sebesar Rp. 9.729.300 dan yang terealisasi sebesar 5.376.400 atau 55,26%.

Hal - Hal yang menunjang keberhasilan/ kegagalan :

1. Memfasilitasi kegiatan Ormas / LSM yang terkait sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesbangpol.
2. Menjalin kerjasama yang baik dengan Toga, Tomas, Ormas / LSM dalam rangka menyelesaikan masalah yang timbul di lapangan
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sehingga permasalahan di lapangan segera dapat diatasi.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Dan Alternatif atau Solusi Yang Telah Dilakukan Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

- Keberhasilan program/kegiatan karena ditunjang oleh sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta dana;
- Kegagalan pencapaian kinerja setiap program/kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

- a. Kurangnya sumber daya aparatur yang memadai dalam peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing -masing;
- b. Belum optimalnya kerjasama dengan Ormas / LSM serta instansi terkait dalam rangka penyebarluasan wawasan kebangsaan
- c. Keterbatasan sumber dana untuk membiayai semua program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar;

**Solusi :**

- 1. Peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional bagi PNS sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- 2. Peningkatan pelaksanaan diklat teknis sesuai tugas dan fungsi
- 3. Peningkatan kreativitas PNS dalam pemahaman dan pelaksanaan peraturan perundang – undangan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- 4. Pemanfaatan waktu yang tepat agar semua pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.

**5. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN V**

<p>SASARAN 5</p> <p>TERINTERNALISASIKANNYA KETAHANAN IDEOLOGY, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CAPAIAN KINERJA SASARAN :**

**Tabel 3.15**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 5**  
**Terinternalisasikannya ketahanan ideology, wawasan kebangsaan**  
**dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	70%	70%	100%

Dari tabel 3.11. di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja Tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat pada tahun 2022 yaitu sebesar 70%, sedangkan realisasinya sebesar 70% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Dengan kata lain bahwa Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar dikategorikan sangat baik.

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5**  
**Terinternalisasikannya ketahanan ideology, wawasan kebangsaan**  
**dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>		<b>Realisasi</b>		<b>Capaian</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	70%	70%	70%	70%	100%	100%

Untuk mencapai indikator kinerja diatas dilaksanakan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 203.911.100 dan terealisasi sebesar Rp. 196.871.398 atau 96,55%. Terdapat dua sub kegiatan ini yaitu **pertama** sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.042.000 dan terealisasi sebesar Rp. 156.883.200 atau 97,42%, dimana aktifitasnya adalah **pertama** pelaksanaan tes urin bagi pejabat eselon 2 dan eselon 3 sebanyak 200 orang dan pelaksanaan penyuluhan pencegahan bahaya penggunaan dan peredaran narkoba dan prekursornya bagi siswa SLTA dengan jumlah peserta sebanyak 78 orang yang berasal dari siswa SLTA dan sederajat se Kecamatan Benteng bertempat di Gedung PKK Kabupaten Kepulauan Selayar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.042.000 dan terealisasi sebesar Rp. 91.883.000 atau 95,67%.

Adapun peserta dari siswa sekolah Lanjutan Tingkat atas yang mengikuti penyuluhan tersebut sebagai berikut :

- a. SMA Negeri 1 Selayar sebanyak 13 orang
- b. SMA Muhammadiyah Selayar sebanyak 13 orang
- c. SMK Negeri 1 Selayar sebanyak 13 orang
- d. SMK Negeri 3 Selayar sebanyak 13 orang
- e. SMK Negeri 5 Selayar sebanyak 13 orang
- f. MAN Bontoharu sebanyak 13 orang

Selanjutnya pemateri untuk kegiatan penyuluhan ini adalah sebagai berikut :

1. Cegah diri dari Penggunaan NAFZA oleh Kapolres Kepulauan Selayar
2. Sosialisasi Narkoba oleh dr. Hj. Misnah, M.Kes.Sp.PK (Dinas Kesehatan).

Penanganan masalah narkoba di Kabupaten Kepulauan Selayar menurut data prevalensi pengguna narkoba di Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada urutan ke 3 di Sulawesi Selatan sebagai pengguna narkoba, hal ini sangat memprihatinkan dan menjadi ancaman terhadap stabilitas daerah.

Untuk menyikapi permasalahan sosial kemasyarakatan tersebut diatas, khususnya masalah bahaya narkoba, yang menjadi salah satu ancaman terhadap stabilitas keamanan, ancaman hilangnya generasi muda yang sehat yang menjadi tiang utama generasi penerus bangsa, untuk memerangi masalah Narkoba khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik Badan Kesbangpol perlu mendukung Program Nasional Perang terhadap Narkoba dengan cara bekerjasama dan bersinergi dengan Lembaga/ Instansi terkait, dan Instansi Vertikal untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah dalam memerangi Narkoba salah satunya adalah membuat Perda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika dan Prekursor narkotika (P4GN PN) yang memuat sekurang-kurangnya Antisipasi Dini, Pencegahan, Penanganan, Rehabilitasi, Pendanaan dan

Partisipasi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Permendagri 12 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2021 dengan melakukan Sosialisasi P4GN kepada Pelajar, Mahasiswa, Ormas, LSM dan Tokoh Agama.

Untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap narkoba dan prekursor narkoba, maka Badan Kesatuan Bangsa telah memfasilitasi terbentuknya Tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN), yaitu dengan menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 472 / VIII/Tahun 2019 yang nantinya tim ini bertugas melakukan rencana aksi di masing-masing instansinya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Aktifitas **yang kedua** adalah Pemberian Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 65.000.000 atau 100%. Tujuan dari pemberian hibah kepada FKUB adalah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

**Sub Kegiatan yang Kedua** adalah pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.869.000 dan terealisasi sebesar Rp. 39.988.000 atau 93,28%, yang terdiri dari dua aktifitas, aktifitas **pertama** adalah Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama yang dialokasikan anggaran

sebesar Rp. 17.414.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.991.000 atau 91,83%.

Secara umum dapat kami sampaikan bahwa tujuan pelaksanaan Forum Komunikasi Umat beragama ini agar seluruh umat beragama umat beragama dapat saling menghargai dan menghormati di dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan masing-masing, dengan diadakannya Forum Kerukunan Umat Beragama ini diharapkan tidak terjadi adanya konflik antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Selayar, adapun unsur-unsur keagamaan yang tergabung ke dalam Forum Kerukunan Umat beragama ini adalah unsur MUI, NU, Muhammadiyah, Protestan, Katholik , Hindu, Budha dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Saat ini, Kedudukan Sekretariat FKUB berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Alamat Jalan DR. Ratulangi No. Benteng.

Pada Pelaksanaannya, kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh FKUB Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum dapat kami simpulkan kedalam agenda kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat Kerja
2. Rapat Koordinasi
3. Rapat Konsultasi
4. Dan sosialisasi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006

Rapat-rapat koordinasi dengan pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) ini diselenggarakan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tanggal 20 Oktober 2022. Adapun pengurus FKUB terdiri dari beberapa

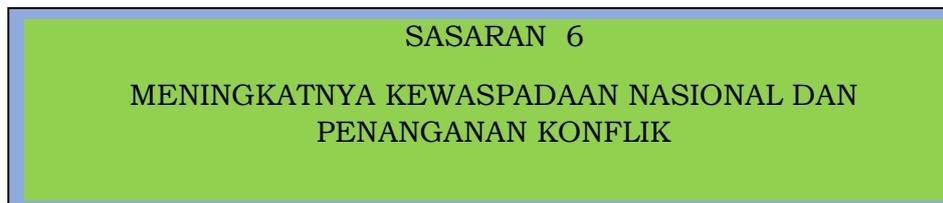
Tokoh agama yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar berjumlah 17 orang.

Aktifitas **kedua** adalah pengawasan aliran kepercayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.455.000 dan teralisasi sebesar Rp. 23.997.000 atau 94,27%. Aktifitas kegiatan ini adalah penyuluhan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan peserta sebanyak 50 orang di Desa Kohala Kecamatan Buki pada tanggal 28 Oktober 2022.

Adapun pembawa materi dari kegiatan ini adalah :

1. Dialog dan Kerjasama antar Umat Beragama oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Ekspresi Budaya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat adat oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Selayar
3. Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama (Perspektif Sosiologi oleh Ketua MUI Kab. Kepulauan Selayar
4. Percepatan Moderasi Beragama dan Penghormatan Aliran Kepercayaan oleh Pasi Intel Kodim 1415 Kepulauan Selayar

## **6. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN VI**



**CAPAIAN KINERJA SASARAN :**

**Tabel 3.17.**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 6**  
**Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	54,54%	54,54%	100%

Dari tabel 3.12. di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja Meningkatkan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik pada tahun 2022 yaitu sebesar 54,54%, sedangkan realisasinya sebesar 54,54% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Dengan kata lain bahwa Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar dikategorikan sangat baik.

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

**Tabel 3.18.**  
**Perbandingan capaian Kinerja Sasaran 6**  
**Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>		<b>Realisasi</b>		<b>Capaian</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	54,54%	54,54%	54,54%	54,54%	100%	100%

Untuk mencapai indikator kinerja yaitu Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik adalah melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik dengan anggaran sebesar Rp. 255.687.200 dan terealisasi sebesar Rp. 228.380.000 atau 89,32% yang terbagi dalam 2 sub kegiatan yaitu **pertama** sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan anggaran sebesar Rp. 202.863.000 yang terealisasi sebesar Rp. 191.624.200 atau 94,46%.

Aktifitas sub kegiatan tersebut adalah **pertama** Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.690.000 dan terealisasi sebesar Rp. 27.797.200 atau 96,88%, aktifitas kegiatan ini dilaksanakan guna mengidentifikasi masalah Ipoleksosbud Hankam melalui pengumpulan bahan keterangandi Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan setiap bulannya melalui kegiatan rapat koordinasi dan melakukan rapat konsultasi/evaluasi bersama dengan unsur-unsur intelijen daerah. Forum kewaspadaan dini daerah ini baru dibentuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu di Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki dan Kecamatan Bontomatene dan selanjutnya pada tahun 2023 akan dibentuk Forum kewaspadaan dini di kecamatan kepulauan.

Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah melaksanakan koordinasi dengan melakukan rapat/pertemuan membahas agenda permasalahan yang merupakan isu sentral di kalangan masyarakat serta melakukan pengkajian dan evaluasi perkembangan situasi aktual daerah dalam bidang politik, ekonomi, social budaya, keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Secara umum dapat kami sampaikan bahwa tujuan pelaksanaan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah ini mengacu kepada Permendagri 46 tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di daerah.

Tim Kewaspadaan Dini Daerah diketuai oleh Bupati Kepulauan Selayar dengan unsur - unsur keanggotaan yang terlibat dalam Tim ini adalah unsur Kepala Perangkat Daerah dan para camat se Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan kewaspadaan Dini Daerah adalah :

- a) Melaksanakan pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan Buki pada tanggal 18 Juli 2022 dengan keanggotaannya terdiri dari Kepala Desa dan unsur Unit Pelaksana Teknis di wilayah Kecamatan Buki.
- b) Melaksanakan pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan Bontomanai pada tanggal 19 Juli 2022 dengan keanggotaannya terdiri dari Kepala Desa dan unsur Unit Pelaksana Teknis di wilayah Kecamatan Bontomanai.
- c) Melaksanakan pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan Bontosikuyu pada tanggal 21 Juli 2022 dengan keanggotaannya terdiri dari Kepala Desa dan unsur Unit Pelaksana Teknis di wilayah Kecamatan Bontosikuyu.

- d) Melaksanakan pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan Bontoharu pada tanggal 25 Juli 2022 dengan keanggotaannya terdiri dari Kepala Desa dan unsur Unit Pelaksana Teknis di wilayah Kecamatan Bontoharu.
- e) Melaksanakan pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan Benteng pada tanggal 26 Juli 2022 dengan keanggotaannya terdiri dari Kepala Desa dan unsur Unit Pelaksana Teknis di wilayah Kecamatan Benteng.
- f) Melaksanakan pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan Bontomatene pada tanggal 27 Juli 2022 dengan keanggotaannya terdiri dari Kepala Desa dan unsur Unit Pelaksana Teknis di wilayah Kecamatan Bontomatene.

Aktifitas yang **kedua** adalah penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOMINFO) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.023.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.677.000 atau 56,06%. Adapun kegiatan dari Puskominfo adalah melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan para tim kewaspadaan dini dari Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki dan Kecamatan Bontomatene pada tanggal 18 November 2022 di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jumlah peserta rapat sebanyak 135 orang.

Maksud dan tujuan kegiatan Penyelenggaraan PUSKOMINFO adalah :

1. Untuk menjadi wadah dalam pengumpulan informasi yang dapat mempengaruhi stabilitas IPOLEKSOSBUD HANKAM di daerah
2. Untuk mendukung tim Kewaspadaan Dini di daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat.

Aktifitas **ketiga** adalah pemberian Hibah kepada TNI Angkatan Laut dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 151.150.000 dan terealisasi sebesar Rp. 151.150.000 atau 100%. Hibah ini digunakan untuk mendukung program-program pemerintah daerah dalam pencapaian Visi pembangunan daerah.

Selanjutnya sub kegiatan yang **kedua** adalah sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan anggaran sebesar Rp. 33.389.200 yang terealisasi sebesar Rp. 25.965,600 atau 77,77%.

Aktifitas dari kegiatan tersebut diatas adalah Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan jumlah anggaran sebesar dan terealisasi sebesar Rp 33.389.200 yang terealisasi sebesar Rp. 25.965,600 atau 77,77%.

Aktifitas dari Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial ini adalah melaksanakan sosialisasi Penanganan Konflik yang bertempat di Aula Kecamatan Bontosikuyu pada tanggal 30 November 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang dari tokoh masyarakat setempat.

Yang **sub kegiatan ketiga** adalah sub kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan anggaran sebesar Rp. 19.435.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 10.790.200 atau 55,52%.

Aktifitas kegiatan ini adalah Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Orang asing dimana kegiatan yang dilaksanakan melalui rapat – rapat koordinasi, monitoring dan konsultasi serta pengolahan informasi tentang kegiatan orang asing yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Untuk kegiatan pemantauan kegiatan orang asing, jumlah orang asing yang berkunjung di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016 sebanyak 171 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 484 orang sedangkan untuk tahun 2018 sebanyak 574 orang, pada tahun 2019 sebanyak 1.068 orang, untuk tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan manca negara sebanyak 155 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 24 orang dan selanjutnya untuk tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan manca negara sebanyak 132 orang atau meningkat sebanyak 450%. Adapun maksud kunjungan adalah melakukan bisnis dan pleasure (rekreasi).

Adapun perkembangan orang asing yang berkunjung di Kabupaten Kepulauan Selayar dari Tahun 2016 – 2022 sebagai berikut :

**Tabel 3.19.**  
**DATA KUNJUNGAN WISAWATAN ASING**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2018 – 2022**

NO	TAHUN	JUMLAH WISATAWAN ASING	Kenaikan / Penurunan %
1	2018	574	
2	2019	1.068	86,06%
3	2020	155	-85,49%
4	2021	24	-84,52%
5	2022	132	450%

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Kepulauan Selayar

Adapun orang asing yang melakukan kegiatan tetap di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dalam bidang jasapariwisata dan kegiatan bisnis. Kegiatan pariwisata yang dilakukan dalam bidang wisata air dan jasa rekreasi berupa diving/snorkling dan resort sedangkan kegiatan bisnis yang dilakukan adalah dalam bidang industri kosmetik, dan minyak astiri serta pedagang klontongan. Pelaksanaan pemantauan kegiatan orang asing telah mencapai target dengan tingkat capaian kinerja bernilai baik yaitu 100 %.

Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing yang dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol dengan jumlah anggota sebanyak 26 orang terdiri dari unsur Intelijen Polres Kep. Selayar, Intelijen dari Kodim 1415 Kep. Selayar, para camat dan unsur dari ketenagakerjaan juga berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Makassar.

Faktor keberhasilan dari indikator meningkatnya kewaspadaan dan penanganan konflik di Kepulauan Selayar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut adalah :

1. Adanya forum-forum strategis yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Forum-forum ini berperan penting dalam mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi

permasalahan yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi antara Kesbangpol dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Adanya rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di daerah yang difokuskan kepada kasus-kasus sosial yang ada di masing-masing daerah demi menjaga kondusifitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.
4. koordinasi yang baik dari masing-masing instansi yang membidangi antara lain Satpol PP, Kantor Kementerian Agama, Kodim 1415, Kantor Kesbangpol, dan Kepolisian.
5. Keterbukaan pada masing-masing sekolah untuk mengatasi masalah kenakalan remaja, Miras dan narkoba serta illegal fishing.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja adalah sebagai berikut ;

1. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah, dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatnya potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan dalam menciptakan kondusivitas daerah, serta tingginya intensitas gangguan kamtibmas. Penyebabnya antara lain adalah perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang

teknologi informasi, budaya, dan ekonomi yang memunculkan eksese-eksese negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dan kejahatan yang bersifat transnasional.

3. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Adapun Solusi dalam menghadapi kendala dan hambatan pencapaian indikator diatas adalah :

1. Melaksanakan rapat tim dan rapat koordinasi terkait dengan penanganan masalah strategis di daerah dalam rangka menyamakan persepsi, dan menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam penyelesaian potensi konflik. Rapat tim atau rapat koordinasi yang dilakukan melibatkan Tim Kewaspadaan Dini Daerah, Pasi Intel Kodim 1415 Selayar dan Kasat Intelkam Polres Selayar serta Kasi Intel Kejaksaan Negeri Selayar.
2. Melakukan tindakan intelijen serta mengintensifkan kembali monitoring dan evaluasi situasi dan kondisi daerah
3. Meningkatkan intensitas pertemuan dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Satpol PP, Forum Kewaspadaan Dini Daerah, Forkopimda, TNI, Kejari, dan instansi terkait lainnya dalam penanganan masalah strategis daerah.
4. Memperkuat fungsi dan peran forum-forum strategis daerah

## **C. REALISASI KEUANGAN**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi, Pemerintahan Daerah sebagai daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan sekaligus kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah diberikan sejumlah kewenangan dalam urusan pemerintahan untuk mengelola sumber-sumber keuangan dalam membiayai jalannya roda pemerintahan, penyediaan pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Konkritnya, berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas, daerah harus dapat menggali sumber daya yang dimiliki dan dipergunakan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan cara memberi perlindungan, menyediakan pelayanan, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan kemampuan, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

Penerapan prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Adapun target dan realisasi keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

### **1. Target dan realisasi anggaran**

Pada pelaksanaan kegiatan anggaran yang diterima pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.020.787.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.860.258.994,- atau sebesar 96,01%.

Secara umum dapat kami sampaikan bahwa anggaran yang diterima oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 4.020.787.800,-

terbagi kedalam Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan perincian, sebagai berikut :

**a. Belanja Operasi**

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar yang dialokasikan sebesar Rp. 3.932.457.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.778.533.994,- atau sebesar 96,09%.

Adapun perincian belanja operasi dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- Belanja Pegawai yang terdiri dari Belanja Gaji Pokok dan Belanja Tunjangan – tunjangan pegawai serta honorarium dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.430.957.008,- dengan terealisasi sebesar Rp. 1.391.166.958,- atau 97,22%.
- Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.008.938.988,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.894.806.507,- atau 88,69%.
- Belanja Hibah yang terdiri dari Belanja Hibah kepada Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.492.561.804 dan terealisasi sebesar Rp. 1.492.560.529 atau 100%. atau 100 %.

## b. Belanja Modal

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Alat angkutan, Belanja Modal alat Kantor dan Rumah Tangga dan Belanja Komputer. Belanja Modal jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 88.330.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 81.725.000,- atau 92,52%.

Adapun alokasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.14.

**Tabel 3.20.**  
**JUMLAH ALOKASI ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA,  
DAN POLITIK TAHUN 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	6
	<b>Belanja</b>	<b>4.020.787.800</b>	<b>3.860.258.994</b>	<b>96,01%</b>
<b>I</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>3.932.457.800</b>	<b>3.778.533.994</b>	<b>96,09%</b>
	Belanja Pegawai	1.430.957.008	1.391.166.958	97,22%
	Belanja Barang dan Jasa	1.008.938.988	894.806.507	88,69%
	Belanja Hibah	1.492.561.804	1.492.560.529	100%
<b>II</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>88.330.000</b>	<b>81.725.000</b>	<b>92,52%</b>
	Belanja Modal dan Angkutan	29.000.000	23.345.000	80,50%
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	37.880.000	36.930.000	97,49%
	Belanja Modal Komputer	21.450.000	21.450.000	100%
		-	-	-

Adapun pengukuran kinerja dan evaluasi (berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan) sebagai berikut:

### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.145.032.896,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.048.480.867,- atau 95,50%. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.965.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.525.000 atau 89,69%, yang terbagi dalam sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 1.395.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.395.000,- atau 100%.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.700.000,- atau 87,63%.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.820.000,- atau 88,35%.
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.820.000,- atau 88,35%.
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.820.000,- atau 88,35%.
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dengan alokasi

- anggaran sebesar Rp. 2.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.260.000,- atau 99,40%.
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.710.000,- atau 87,69%.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp, 1.395.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.395.000,- atau 100%, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran Rp, 1.430.957.008,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.391.166.958,- atau 97,33%,
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran Rp, 5.347.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.797.000,- atau 89,71%
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 322.264.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 319.937.430,- atau 99,28%, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100%.
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.080.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.080.000,- atau 100%.
  3. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.194.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.950.600,- atau 97,82%.

4. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6,420.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.520.000,- atau 85,98%.
  5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 261.570.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 260.386.830,- atau 99,55%.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.645.000,- atau 86,31%, dengan sub kegiatannya sebagai berikut :
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.345.000,- atau 80,50%.
  2. Pengadaan Mebelier dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.300.000,- atau 94,15%.
  3. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100%.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 221.799.288,- dan terealisasi sebesar Rp. 193.219.329,- atau 87,11%, dengan sub kegiatannya sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar

- Rp. 61.875.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.535.129,- atau 75,21%.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 159.924.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 146,684.200,- atau 91,72%.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.102.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 85.190.150,- atau 83,15%, dengan sub kegiatannya sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 62.740.150,- atau 78,43%.
  2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%.
  3. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.450.000,-atau 100%.

**2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan,** dengan kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.902.200 dan yang terealisasi sebesar Rp. 59.920.800 atau 85,72%. Pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan untuk 2 sub kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan dengan alokasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 24.720.000 atau 98,88%. Pelaksanaan sub kegiatan ini dibagi menjadi aktifitas yaitu :
  - Sosialisasi 4 Pilar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.651.200 yang terealisasi sebesar Rp. 23.241.200 atau 87,21%.
2. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.251.000 yang terealisasi sebesar Rp. 36.679.600 atau 84,81%. Pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan aktifitas yaitu:
  - Sosialisasi pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda yang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 29.066.0000 dan terealisasi sebesar Rp. 22.847.400 atau 78,61%.
  - Forum pembauran Kebangsaan (FPK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.185.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.832.200 atau 97,51%.

**3) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik,** dengan kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 672.535.104 dan terealisasi sebesar Rp. 669.403.029 atau 99,53%. Pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan untuk sub kegiatan yaitu :

1. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 672.535.104 dan terealisasi sebesar Rp. 669.403.029 atau 99,53%. Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari aktifitas- aktifitas sebagai berikut :

- Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Keuangan kepada partai politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.140.300 dan yang terealisasi sebesar Rp. 8.693.700 atau 78,04 %.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.983.000 dan terealisasi sebesar Rp. 7.298.800 atau 91,43%.

- Bantuan Keuangan kepada partai politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 653.411.804 dan terealisasi sebesar Rp. 653.410.529 atau 100%.

**4) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan :**

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 673.719.300 dan terealisasi sebesar Rp. 657.202.900 atau 97,55%. Pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan untuk sub kegiatan yaitu :

1. pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 673.719.300 dan terealisasi sebesar Rp. 657.202.900 atau 97,55%. Pelaksanaan sub kegiatan terdiri dari 3 aktifitas kegiatan yaitu :

- Pembinaan Ormas dan LSM Bidang Kesbangpol dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.990.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 28.826.500 atau 70,33%.
- pendataan dan pendaftaran ORMAS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.729.300 dan yang terealisasi sebesar 5.376.400 atau 55,26%.
- Pemberian Hibah bagi ormas/LSM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 623.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 623.000.000 atau 100%.

**5) Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya,**dengan kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 203.911.100 dan terealisasi sebesar Rp. 196.871.398 atau 96,55%. Pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan untuk 2 sub kegiatan yaitu :

1) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.042.000 dan terealisasi sebesar Rp. 156.883.200 atau 97,42%. Pelaksanaan sub kegiatan ini dibagi menjadi aktifitas-aktifitas yaitu :

- Pelaksanaan tes urin bagi pejabat eselon 2 dan eselon 3 dan pelaksanaan penyuluhan pencegahan bahaya penggunaan dan peredaran narkoba dan prekursorinya bagi siswa SLTA se Kecamatan Benteng dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.042.000 dan terealisasi sebesar Rp. 91.883.000 atau 95,67%.
- Pemberian Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 65.000.000 atau 100%.

2) pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat

beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.869.000 dan terealisasi sebesar Rp. 39.988.000 atau 93,28%.

Pelaksanaan sub kegiatan ini dibagi menjadi 2 sub-sub kegiatan yaitu :

- Forum Kerukunan Umat beragama dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.414.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.991.000 atau 91,83%.
- Pengawasan aliran kepercayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.455.000 dan teralisasi sebesar Rp. 23.997.000 atau 94,27%.

**6) Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial,**

dengan kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 255.687.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 228.380.000,- atau 89,32%. Pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan untuk 3 sub kegiatan yaitu :

- 1) pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 202.863.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 191.624.200,- atau 94,66%. Aktifitas dari kegiatan ini yaitu :

- Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.690.000 dan terealisasi sebesar Rp. 27.797.200 atau 96,88%.
- Penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.023.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.677.000 atau 56,06%.
- Pemberian Hibah kepada TNI Angkatan Laut dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 151.150.000 dan terealisasi sebesar Rp. 151.150.000 atau 100%.

2) Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.389.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.965.600,- atau 77,77%. Aktifitas dari kegiatan ini yaitu :

a. Tim Terpadu Penanganan Konflik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.389.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.965.600,- atau 77,77%.

3) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 19.435.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.790.200,- atau 55,52%. Pelaksanaan sub kegiatan ini dibagi menjadi aktifitas kegiatan yaitu :

- Pemantauan Kegiatan Orang Asing (POA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.435.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.790.200,- atau 55,52%.

## **2. Permasalahan dan solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan lebih disebabkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang senantiasa berubah tanpa memperhatikan kesiapan aparatur pengelolaan keuangan OPD dimana dapat kami sampaikan bahwa secara umum pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayartidak ada satupun yang memiliki latar belakang disiplin pendidikan Akuntansi.

Menyikapi hal tersebut, kiranya perlu adanya pengalokasian pegawai untuk Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki keahlian dibidang Akuntansi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dapat diuraikan berbagai permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik baik eksternal maupun internal sebagai berikut :

- a. Kegiatan yang dilaksanakan oleh parpol sebagian besar tidak dilaporkan/tidak ada Penyampaian Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol dan sebagian kecil agak terlambat menyampaikan laporannya

- b. Kurangnya kesadaran Ormas dan LSM untuk mendaftar /memberitahukan keberadaannya pada Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik.
- c. Banyaknya Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas, OKP, LSM, Paguyuban dan Yayasan sebagian besar tidak dilaporkan serta sebagian besar Ormas,OKP, LSM, Paguyuban dan Yayasan tidak memiliki sekretariat dan tidak memiliki papan nama.
- d. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara unit kerja (SKPD) yang ada di Daerah dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (Ormas / LSM) untuk melampirkan surat keterangan terdaftar Ormas / LSM yang dikeluarkan oleh Kemendagri yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik .
- e. Rendahnya tingkat pemantauan / pelaporan yang berhubungan keamanan, ketertiban umum masyarakat di tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan.
- f. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah, dan mengantisipasi secara dini berbagai gejala sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat
- g. Keterbatasan SDM aparatur pemerintah.
- h. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban
- i. Keterbatasan Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemantauan di lapangan.
- j. Kurangnya kerjasama / koordinasi diantara para unit kerja dalam peningkatan pencegahan penyakit masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

k. Luasnya daerah untuk dijangkau pada setiap kecamatan

1. Belum ada program untuk kerjasama dengan forum-forum kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya solusi menghadapi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat tim dan rapat koordinasi terkait dengan penanganan masalah strategis di daerah dalam rangka menyamakan persepsi, dan menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam penyelesaian potensi konflik. Rapat tim atau rapat koordinasi yang dilakukan melibatkan Tim Kewaspadaan Dini Daerah, Pasi Intel Kodim 1415 Selayar dan Kasat Intelkam Polres Selayar serta Kasi Intel Kejaksaan Negeri Selayar.
2. Melakukan tindakan intelijen serta mengintensifkan kembali monitoring dan evaluasi situasi dan kondisi daerah
3. Meningkatkan intensitas pertemuan dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Satpol PP, Forum Kewaspadaan Dini Daerah, Forkopimda, TNI, Kejari, dan instansi terkait lainnya dalam penanganan masalah strategis daerah.
4. Memperkuat fungsi dan peran forum-forum strategis daerah
5. Ditingkatkannya alokasi dana untuk program pengembangan wawasan kebangsaan pada tahun mendatang.
6. Meningkatkan kegiatan sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan yang dilakukan Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,

Sosial, Budaya Dan Agama di sekolah-sekolah (SLTA) terutama untuk daerah kepulauan.

7. Meningkatkan kegiatan sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan kepada ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Mengadakan kerjasama dengan forum-forum kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan program pengembangan wawasan kebangsaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, serta meningkatkan kerjasama BUMN/BUMD yang ada di daerah sehingga pada pengajuan proposal kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan bisa terealisasi dengan cepat
9. Peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional bagi PNS sesuai bidang tugasnya masing-masing;
10. Peningkatan pelaksanaan diklat teknis sesuai tugas dan fungsi
11. Peningkatan kreativitas PNS dalam pemahaman dan pelaksanaan peraturan perundang – undangan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
12. Pemanfaatan waktu yang tepat agar semua pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam rangka pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar tentunya akan ada banyak hal yang mempengaruhi arah dan kebijakan serta capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022.

Pada bab Penutup dari LAKIP tahun 2022 ini dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar adalah **95,94 %** yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran. Dari 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan terdapat 1 (satu) sasaran yang tidak mencapai target kinerja 100 % dan dalam kategori cukup. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia pada umumnya dan khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar dimana hal tersebut disebabkan karena adanya refocusing anggaran dan kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan kerumunan masyarakat sehingga pencapaian indikator **“ Cakupan pelaksanaan pembinaan karakter “** menjadi cukup.

Namun pencapaian indikator secara keseluruhan masih dalam kategori baik dan keberhasilan tersebut terutama disebabkan semakin meningkatnya kehidupan politik yang demokratis di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kesadaran politik masyarakat dalam pembangunan semakin baik. Disamping masyarakat semakin sadar dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di lingkungannya.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan 6 (enam) program dan 11 (Sebelas) kegiatan serta 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan yang dibiayai oleh APBD Tahun 2022 sebesar Rp 4.020.787.800.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar bukanlah merupakan keberhasilan individu yang diarah tanpa adanya dukungan dan partisipasi seluruh unsur terkait sehingga kerjasama yang baik yang telah dilaksanakan disepanjang tahun 2022 ini kiranya dapat dipertahankan dan secara bertahap ditingkatkan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat semakin meningkat yang kemudian bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya dan secara umum keberhasilan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Core area Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu penanganan masalah – masalah yang dapat mengganggu, ketentraman dan ketertiban, Pembinaan Ideologi Pancasila serta Demokrasi sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) dapat diwujudkan.

Dengan demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan kontribusi bagi pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan untuk **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**.